

MODEL KONSEPTUAL PENGEMBANGAN WISATA BAHARI SECARA BERKELANJUTAN DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KOTA MAKASSAR

Rosmawaty Anwar
Fakultas Pariwisata Universitas Pancasila

Abstract

Makassar City has an enormous potential on marine tourism due to its strategic location in the coastal area of Southern Sulawesi. Makassar is surrounded by several small islands, abundant marine resources and many marine tourism attraction. But the development of tourism within coastal area and small islands is showing unbalance situation. To gain proper development of marine tourism in those coastal area and small islands, an institutional approach is needed. This research suggest a conceptual model of sustainable tourism by deciding leading sector and establishing a consortium which bear management collaboration. This institution is representative of all stakeholder and responsible to optimize coordination, cooperation and consultation within local and regional authorities, tourism industry, local communities, academic institution, non government organization, and mass media. It also needs to provide training on community based tourism.

Keywords: *marine tourism, institutional, coastal area and small islands.*

PENDAHULUAN

Kota Makassar memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata bahari. Hal ini terlihat dari letak dan tipologi wilayahnya yang cukup mendukung, dimana di kawasan pesisirnya terdapat pantai yang berpasir dengan pemandangan alam pantai yang indah yang dapat dinikmati baik pada siang hari maupun pada malam hari, terdapatnya variasi wisata bagi keluarga berupa wisata outbound, theme park, dan situs sejarah, serta beragamnya mata pencaharian masyarakat dan makanan khas yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Sedangkan di kawasan pulau-pulau kecilnya terdapat pantai dengan vegetasi khas pulau, jenis terumbu karang dan jenis ikan karang yang beranekaragam, yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata untuk wisata diving dan snorkelling.

Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Makassar dari sisi supplynya sangat menarik untuk daerah tujuan wisata, sedangkan dari sisi demandnya; potensi wisatawan yang datang cukup menjanjikan, karena sebagian wisatawan sanggup membelanjakan uangnya yang cukup besar untuk sekedar menikmati panorama alam pantai, snorkelling dan diving di pesisir dan pulau-

pulau kecil Kota Makassar. Wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Makassar berasal dari Kota Makassar dan daerah sekitarnya, dan hanya sebahagian kecil yang berasal dari luar Kota Makassar. Mereka datang bersama keluarga yang tergolong usia produktif dengan penghasilan rata-rata menengah. Lama kunjungan wisatawan sebahagian besar hanya 2 jam hingga 5 jam. Hal ini yang mendorong pemerintah Kota Makassar menetapkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai kawasan wisata bahari dengan potensi pemanfaatan yang berbeda-beda. Namun dalam perkembangannya, terjadi ketimpangan pembangunan pariwisata antara kawasan pesisir dengan pulau-

Saat ini, pembangunan pariwisata terfokus hanya di kawasan pesisir, sementara di pulau-pulau kecil belum optimal. Hal ini dikarenakan rendahnya perhatian dan keseriusan pemerintah Kota Makassar dalam pemanfaatan sumberdaya pulau-pulau kecil untuk pemanfaatan wisata yang seharusnya secara ekonomi mampu memberikan manfaat yang optimal dengan tidak mengabaikan keberlanjutan sumberdaya yang tetap lestari. Hal ini dapat terlihat dari sangat minimnya sarana dan prasarana pendukung wisata di pulau-pulau kecil,

rendahnya tingkat pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat di bidang wisata, serta cenderung terjadi degradasi dan disfungsi kawasan akibat dari rendahnya tingkat kesadaran dan penghargaan masyarakat terhadap alam dan lebih dominannya aspek ekonomi daripada aspek ekologi dan sosial budaya dalam hal pengelolaan kawasan. Hal ini terlihat pada Pulau Bonetambung, Barrang Lompo, Gusung Bonebatang yang mana gugusan terumbu karangnya telah mengalami kerusakan yang sangat tinggi akibat penggunaan bahan peledak dan potassium sianida (Bappedalda Kota Makassar, 2003; Jompa, 2003). Akibatnya, kunjungan wisatawan di kawasan pulau-pulau kecil jauh lebih rendah daripada di kawasan wisata pesisir.

Tingginya jumlah wisatawan yang datang ke kawasan pesisir merupakan potensi yang cukup menjanjikan dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan wisata pulau-pulau kecil. Agar jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan pulau-pulau kecil meningkat, maka sepatutnya pemerintah Kota Makassar mengimplementasikan pengembangan infrastruktur menuju pulau-pulau kecil seperti; penambahan jumlah armada perahu atau speed boat sebagai alat transportasi penyeberangan, pembangunan dermaga, penyediaan penginapan yang layak dan menarik dengan mengacu kepada keindahan alam pulau-pulau kecil agar jam kunjungan wisatawan bisa lebih lama bahkan sampai berhari-hari, penyebaran informasi dan promosi wisata yang dilakukan secara terpadu dengan berbagai perencanaan sektoral serta memperhitungkan kesesuaian dan daya dukung kawasan pulau-pulau kecil bagi setiap jenis wisata sehingga tercipta pengelolaan wisata pulau-pulau kecil berkelanjutan sebagai destinasi wisata unggulan di Kota Makassar.

Sementara itu, pengelolaan sumberdaya alam untuk kegiatan wisata di kawasan pesisir belum mengarah kepada pengembangan pariwisata berkelanjutan karena tidak tercapainya prinsip keseimbangan antara aspek kelestarian dengan pengembangan wisata ke masa depan dalam jangka panjang, terjadinya penekanan pada nilai manfaat bagi masyarakat lokal serta tidak terintegrasinya pengelolaan secara ekologi, ekonomi, dan sosial budaya sehingga belum mampu mengembangkan apresiasi masyarakat

terhadap warisan budaya dan lingkungan alam. Contoh kasus; yakni perluasan kawasan wisata Tanjung Bunga yang dipadukan dengan aktivitas pengembangan perekonomian, berupa perluasan area pemukiman dan perdagangan di dalam kawasan wisata bahari dengan mereklamasi pesisir menjadi kawasan wisata yang mengorbankan hutan mangrove di kawasan pesisir Tanjung Bunga telah menimbulkan pencemaran lingkungan perairan yang berdampak terancamnya ekosistem penunjang kehidupan (Wahyuni, 2002; Ramli, 2010; Debora, 2003).

Peraturan Pemerintah nomor 23/2009, menekankan kewajiban dunia usaha untuk melakukan AMDAL terhadap pembangunan yang dilakukan, namun disinyalir dalam pelaksanaan AMDAL hanya sebatas tuntutan administrasi, sekedar pelengkapan persyaratan dokumen pembangunan yang harus dimiliki untuk pelaksanaan pembangunan yang dimaksud. Begitu pula yang terjadi di Pantai Losari dan Pantai Barombong yang merupakan produk wisata pantai unggulan Di Kota Makassar (Ramli, 2010).

Akibat ketidakmampuan penanganan, kerap kali ditemukan kegiatan wisata yang semula dijadikan sebagai daya tarik utama, justru merusak lingkungan hidup. Semula Pantai Losari ini sangat indah karena memiliki perairan yang jernih dan tenang, sangat luas sejauh mata memandang, memiliki pemandangan sunset yang indah di sore hari, sehingga menarik wisatawan asing dan lokal untuk datang menikmati atau sekedar duduk di tepi pantai sambil menikmati makanan khas Kota Makassar. Sayangnya, obyek wisata ini dieksploitasi sangat eksekutif untuk menghasilkan devisa tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan yang mengakibatkan banyaknya kerusakan khususnya biota laut akibat pencemaran perairan, hamparan tepi pantai penuh sesak dengan sebaran sampah, dan ombak pantai hilang akibat rusaknya terumbu karang, akibatnya lokasi ini tidak lagi menarik untuk melakukan kegiatan wisata. Wisatawan datang untuk menikmati alam namun wisatawan pula yang menjadi faktor perusak alam. Ini merupakan dampak negatif dari kegiatan wisata terhadap lingkungan (Debora, 2002).

Kawasan wisata baik di pesisir maupun di pulau-pulau kecil Kota Makassar sebagian besar

telah tercemar dan telah mengalami degradasi dan kerusakan berbagai ekosistemnya sehingga membutuhkan kebijakan dan komitmen semua stakeholder dalam kegiatan pengendalian penataan kawasan wisata serta pengembangan secara lestari. Hal ini menunjukkan pula bahwa kurang seriusnya pihak pemerintah Kota Makassar untuk mendukung program-program wisata bahari berkelanjutan yang berdampak pada pengembangan obyek andalan wisata bahari (Pantai Losari dan Kawasan Wisata Tanjung Bunga) di Kota Makassar, padahal Kota Makassar merupakan salah satu daerah tujuan wisata bahari unggulan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kebijakan di lapangan sebagaimana tersebut di atas, mengindikasikan bahwa kerusakan lingkungan dipicu oleh lemahnya penataan dan penegakan hukum yang tercermin dari sikap dan pengetahuan masyarakat maupun aparat penegak hukum yang rendah terhadap UU No.5/90 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, UU No.23/2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan UU No.27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir yang belum disosialisasikan serta kesalahan kebijakan pemerintah Kota Makassar yang kemudian menimbulkan kesalahan pengelolaan sumberdaya alam. Fauzi dan Sussi (2005) mengatakan bahwa kebijakan ekonomi yang mengarah perilaku memburu rente ditambah dengan inefisiensi birokrasi menyebabkan institusi publik tidak dapat diandalkan untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan kegiatan ekonomi yang merusak lingkungan. Sebenarnya program keberlanjutan lingkungan sumberdaya alam dalam kebijakan sektor pariwisata di Kota Makassar sudah diakomodasikan, namun penerapan di lapangan belum sepenuhnya dipahami model yang bagaimana yang dapat mengakomodasi keberlanjutan pembangunan wisata, perdagangan dan pemukiman di dalam kawasan wisata yang tidak berdampak pada degradasi lingkungan sumberdaya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu disusun model pengembangan pariwisata yang dapat mengakomodasi keberlanjutan pembangunan wisata baik di wilayah pesisir maupun di pulau-pulau kecil Kota Makassar. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan model konseptual pengembangan wisata bahari secara

berkelanjutan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kota makassar. Kami berharap, dengan tersedianya model konseptual ini, maka pengelolaan wisata bahari Di Kota Makassar perlu dilakukan secara terpadu dengan melibatkan kemitraan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan stakeholder lainnya pada beberapa institusi kelembagaan terkait, sehingga masing-masing kepentingan atau sektor pembangunan dilakukan secara harmonis dan terkoordinasi. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk kelembagaan pengelolaan kawasan baik formal maupun non formal.

Model Konseptual Pengembangan Wisata Bahari Secara Berkelanjutan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Kota Makassar

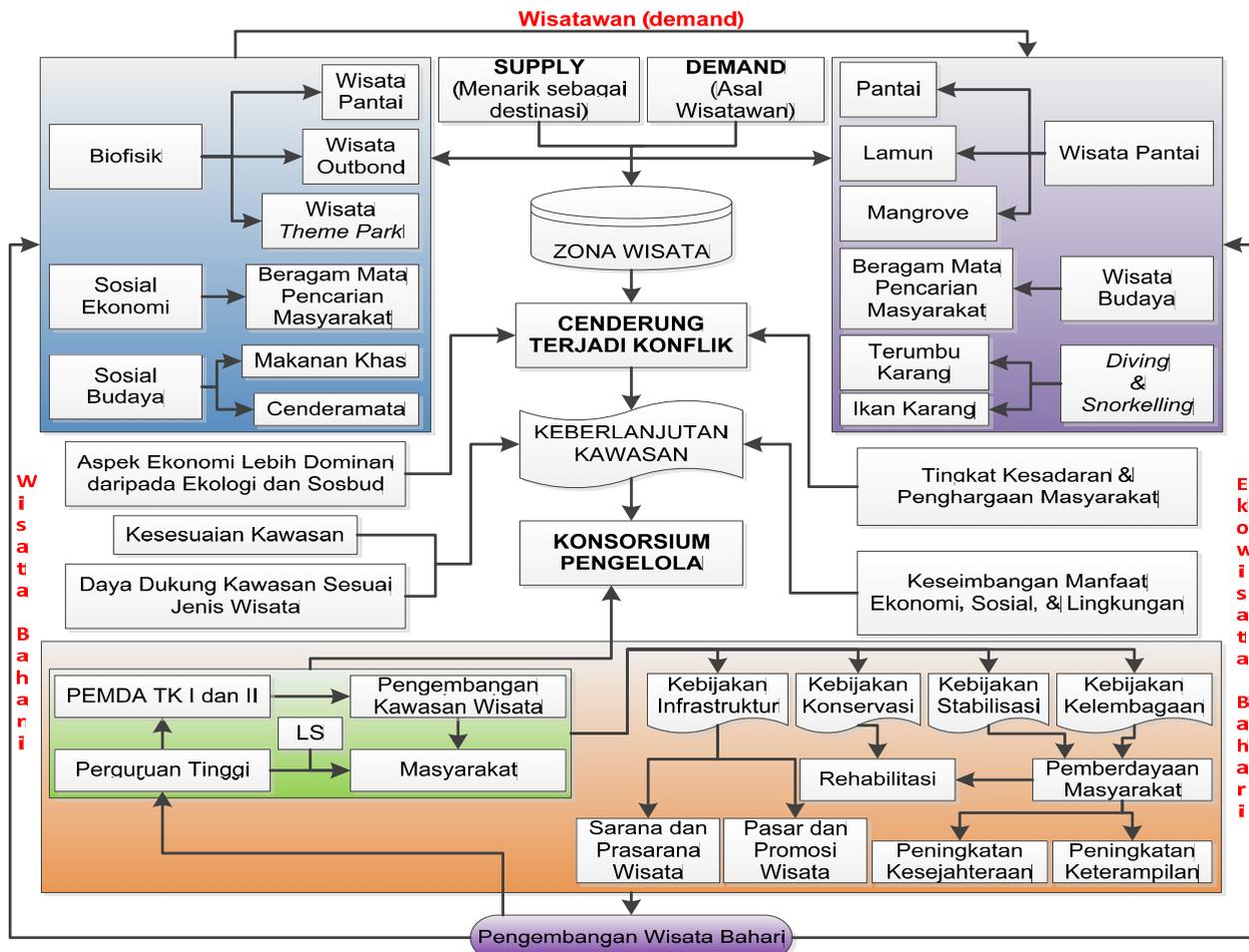
Pariwisata berkelanjutan adalah penyelenggaraan pariwisata yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia saat ini, tanpa mengorbankan potensi pemenuhan kebutuhan dan aspirasi manusia di masa mendatang dengan menerapkan prinsip-prinsip layak secara ekonomi (*economically feasible*) dan lingkungan (*environmentally viable*), cinema secara social (*socially acceptabla*) dan *teknologically appropriate* yaitu tepat guna secara teknologi (Depbudpar, 1990). Selanjutnya, Kurniawan (2010), Lewarherilla (2006), mengemukakan bahwa pengembangan sebuah kawasan wisata bahari akan berhasil apabila pengembangannya terkait dengan aspek institusi atau lembaga pengelolanya, kebijakan ataupun dengan tata cara pengelolaannya, dimana issu strategis pengelolaan harus diawali oleh terbentuknya lembaga pengelola yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan kawasan sehingga keberadaan lembaga ini akan menjadi pendorong disusunnya tatacara pengelolaan.

Tata cara/model konseptual pengembangan wisata bahari di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Makassar agar dapat berkelanjutan adalah pengembangan institusi yang terdiri dari pembentukan lembaga pengelola (*institutional arrangement*) melalui partisipasi dari berbagai institusi baik institusi pemerintah maupun institusi non pemerintah dan akan menghasilkan kesepakatan pengelolaan berupa konsorsium

pengelola. Program pengembangan institusi ini dimaksudkan untuk penguatan lembaga pengelola kawasan wisata melalui kerjasama dan kesepakatan seluruh pihak terkait dengan melakukan penerapan pengelolaan berdasarkan prinsip kolaborasi pengelolaan bersama (management collaboration) dengan tetap menentukan pihak mana yang menjadi leading sektor. Peran dan kerjasama kelembagaan akan menjadi salah satu faktor utama yang perlu mendapat perhatian semua stakeholder dalam pengelolaan dan pengembangan wisata bahari Kota Makassar. Melalui model pengelolaan ini, peran pemerintah, profesional dan para pengusaha menjadi sangat penting untuk saling berkolaborasi dengan masyarakat lokal untuk mendorong bangkitnya pariwisata kota Makassar sebagai tulang punggung perekonomian Kota Makassar pada khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya. Model konseptual pengembangan wisata bahari di wilayah pesisir

dan pulau-pulau kecil kota Makassar disajikan pada Gambar 1.

Kelembagaan yang akan mengemban tugas dan tanggungjawab harus mengakomodasi keterwakilan semua stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan wisata bahari tersebut. Adapun program aksi pengembangan institusi ini adalah optimalisasi forum koordinasi, konsultasi dan kerjasama antar stakeholder yang peduli wisata pesisir dan pulau-pulau kecil, serta melakukan pelatihan manajemen pengelolaan wisata bahari yang berbasis masyarakat. Koordinasi antar institusi ini menjadi hal yang sangat penting untuk dapat mencapai tujuan strategi pengelolaan wisata bahari berkelanjutan. Koordinasi dan kerjasama antar stakeholder wisata bahari tersebut terdiri dari pemerintah Kota Makassar dan pemerintah Provinsi Sulsel, pengembang kawasan wisata bahari (dunia usaha), masyarakat lokal, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan media massa.



Gambar 1. Model Konseptual Pengembangan Wisata Bahari Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Makassar

1) Koordinasi dan Kerjasama Dalam Lingkup Pemerintah Daerah.

Koordinasi pengelolaan dan implementasi dari setiap rencana program wisata bahari dilakukan melalui Pemerintah Daerah terutama Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Kabupaten Maros, Pemerintah Kabupaten Pangkep, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pola kerjasama dalam pengelolaan dan pengembangan wisata bahari di Kota Makassar melalui sistem pengelolaan secara terpadu dan berkesinambungan serta sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi sebagai wujud implementasi otonomi daerah secara luas dan nyata untuk pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik dan hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat, dan lembaga swadaya masyarakat.

Upaya koordinasi diharapkan senantiasa mengedepankan prinsip pengelolaan secara terpadu dan terintegrasi. Inisiasi dan frekuensi koordinasi dapat berjalan dengan optimal agar membuka peluang pelaksanaan kegiatan mulai dari proses perencanaan, implementasi program sampai pada proses monitoring dan evaluasi. Kegiatan koordinasi khususnya diharapkan dapat menjangkau pihak-pihak di dalam instansi Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pusat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media massa, dan swasta. Sedangkan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pusat menjadi kebutuhan prioritas, mengingat letak wilayah pulau-pulau kecil Kota Makassar berbatasan langsung dengan Kabupaten Takalar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Pangkep. Wilayah gugusan Kepulauan Kota Makassar, pada umumnya masih tertinggal dalam segala dimensi pembangunan sehingga diperlukan keterlibatan semua instansi pembangunan untuk mengejar segala ketertinggalan yang masih menjadi faktor penghambat kemajuan pembangunan di wilayah pulau-pulau kecil Kota Makassar.

Lintas koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/kota dan Propinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Pusat melalui

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Departemen Kelautan dan Perikanan sebagai mediator dengan instansi/lembaga terkait seperti, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kehutanan, Departemen Komunikasi Dan Informasi, Departemen Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Perdagangan, Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Kesehatan.

2) Koordinasi dan Kerjasama dengan Masyarakat Lokal.

Komponen masyarakat lokal menjadi prioritas keterlibatan dalam setiap kegiatan, mulai dari proses perencanaan, implementasi program sampai pada monitoring dan evaluasi. Hal ini diharapkan demi pencapaian target yang efisien dan partisipatif. Masyarakat lokal yang diharapkan terdiri dari Aparat Desa, Badan Perwakilan Kampung, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kepemudaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan organisasi kewanitaan. Peran serta masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan wisata bahari diharapkan mampu membangkitkan rasa kepemilikan dan tanggungjawab terhadap semua hasil-hasil pembangunan wisata tersebut.

3) Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki peran penting baik sebagai fasilitator atau pendamping masyarakat, maupun sebagai motivator dan fasilitator terhadap semua masukan dan informasi strategi dan kebijakan pembangunan. LSM lokal harus berperan aktif dalam setiap kegiatan, mulai pada saat inisiasi dan akselerasi pembangunan wisata.

4) Koordinasi dan Kerjasama dengan Media Massa.

Dalam rangka menumbuhkan kesadaran terhadap rencana pengelolaan dan pengembangan wisata bahari di pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Makassar serta promosi potensi industri wisata bahari serta sosial budaya masyarakat

lokal sebagai salah satu kearifan lokal yang perlu dibina, maka dibutuhkan perangkat media massa. Dalam dunia modern seperti sekarang diperlukan dukungan dan kerjasama dengan media massa sebagai media komunikasi dan informasi yang berperan aktif dalam memacu pembangunan wisata bahari di Kota Makassar. Dukungan media massa bagi strategi komunikasi dan informasi pengelolaan akan memperluas daya imbasnya, tidak hanya untuk masyarakat sekitar tetapi juga mampu menjangkau tingkat nasional dan internasional. Media masa dalam hal ini, adalah media cetak, media elektronik, dan media alternatif.

5) Koordinasi dan Kerjasama dengan Pengusaha Swasta.

Keterlibatan dan koordinasi dengan swasta sebagai pengembang usaha di bidang wisata bahari juga tidak kalah penting. Pelaksanaan pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan peran serta pemerintah saja. Justru saat ini peran serta swasta dalam berbagai program pembangunan wisata bahari harus terus didorong. Pemerintah justru sebaiknya hanya berperan sebagai fasilitator dan regulator, sedangkan pihak swasta yang diharapkan memberikan kontribusi yang besar dalam berbagai program pembangunan baik di pusat maupun daerah. Pihak pengusaha pengelola/pengembangan usaha wisata bahari akan menjadi motivator yang sangat berperan. Dalam berbagai program pengembangan wisata bahari yang direncanakan, maka peluang keterlibatan swasta dalam proses pengembangannya harus menjadi perhatian utama.

Pengusaha/swasta harus didorong dan diberikan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk turut berpartisipasi dalam berbagai rencana program pengembangan wisata bahari yang akan dilaksanakan. Peran swasta ini terutama sebagai investor pada berbagai rencana program yang ditetapkan. Dengan keterlibatan dan kerjasama pihak pengusaha jelas akan memberikan andil cukup besar dalam pencapaian target sesuai harapan. Kerjasama para pengusaha atau swasta

untuk menciptakan suatu iklim usaha wisata bahari yang kondusif akan mendorong dunia usaha wisata untuk mengembangkan usaha yang bernilai ekonomi penting dan mampu mengangkat derajat perekonomian masyarakat disekitar kawasan wisata.

Pengusahaan wisata bahari di pesisir dan pulau-pulau kecil harus berbentuk Badan Hukum Indonesia dan terbuka untuk penanaman modal sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Izin prinsip pengusahaan wisata bahari diberikan oleh Pemerintah Daerah sedangkan izin penanaman modal diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk satu atau beberapa pulau tidak berpenghuni yang sangat kecil dan berdekatan, memungkinkan untuk mengembangkannya menjadi kawasan wisata yang dikelola dalam satu manajemen tertentu.

Pembangunan sarana dan prasarana wisata bahari dilakukan berdasarkan perencanaan tapak kawasan (*site plan*) pulau yang telah disetujui Pemerintah Daerah Kota Makassar. Sedangkan pengusahaan wisata bahari di pulau-pulau kecil wajib menghormati nilai-nilai agama, adat istiadat dan tata nilai masyarakat di pulau dan sekitar pulau, menyediakan pemondokan, sarana ibadah dan kebutuhan lainnya bagi karyawan yang tinggal pulau, melarang segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan perjudian, prostitusi dan perdagangan narkoba di area pengusahaannya dan daerah sekitar, membuka akses perairan sekitar pulau untuk masyarakat lokal, serta menyediakan fasilitas dan tenaga yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan dan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) sesuai dengan standar yang berlaku. Pola kerjasama dan koordinasi antar institusi dalam pengelolaan dan pengembangan wisata bahari di Kota Makassar melalui sistem pengelolaan secara terpadu nantinya akan melahirkan suatu kesepakatan bersama melalui forum musyawarah berupa konsorsium pengelola.

Konsorsium pengelola merupakan hasil kesepakatan antar pemerintah daerah Tingkat I dan daerah Tingkat II melalui Badan

Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) dengan arahan dan rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan antar institusi non pemerintah seperti pihak swasta sebagai pengembang kawasan wisata (Gowa Makassar Tourism Development Corporation) Tanjung Bunga) dan investor asing dan kebangsaan Jerman sebagai pengembang Pulau Kodinggareng Keke, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan masyarakat lokal yang berperan dalam proses pembentukan konsorsium pengelola tersebut. Konsorsium pengelola juga menerima masukan dari institusi non pemerintah berupa saran, kritik dan hasil penelitian serta informasi lainnya. Konsorsium pengelola ini akan menjalankan sistem pengelolaan kawasan wisata bahari secara berkelanjutan yang selanjutnya akan dievaluasi oleh instansi teknis terkait dari pemerintah, dimana pemerintah TK II Kota Makassar mengevaluasi pelaksanaan yang bersifat operasional, sedangkan pemerintah TK I Sulsel mengevaluasi pelaksanaan sistem pengelolaan yang bersifat koordinasi dan sebagai pengawas dan pemberi arahan.

Adapun sistem pengelolaan kawasan wisata bahari secara berkelanjutan di Kota Makassar adalah terdiri dari kebijakan konservasi lingkungan sebagai landasan dalam kegiatan rehabilitasi kawasan dan rehabilitasi SDA, kebijakan stabilisasi sosial-budaya, kebijakan infrastruktur, dan kebijakan promosi. Hasil ini disintesis dengan hasil analisis dari preferensi pakar dan stakeholder untuk membangun sistem pengelolaan kawasan wisata pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Makassar secara berkelanjutan.

Kebijakan Konservasi Kawasan Wisata Bahari

Kebijakan konservasi lingkungan wisata bahari sebagai landasan dalam kegiatan rehabilitasi kawasan dan rehabilitasi SDA. Dalam UU No.5 tahun 1990, konservasi mengandung makna substansi yaitu mewujudkan kelestarian keanekaragaman hayati secara serasi dan seimbang, terutama untuk mendukung

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Sehubungan dengan fungsi dan kewenangan konservasi maka wewenang konservasi di Kota Makassar berada pada Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA). Seringkali pelaksanaan program dan aksi kebijakan di lapangan tidak berjalan semestinya karena terkendala dengan adanya konflik kepentingan pemanfaatan dan kurang pedulinya pemerintah lokal terhadap pentingnya konservasi lingkungan hidup. Sementara, di daerah yang menjalankan tugas dan wewenang lingkungan hidup adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kota Makassar.

Pihak pemerintah daerah melalui BAPEDALDA dan BKSDA dan masyarakat lokal menjadi motivator pengelolaan memiliki tugas fungsional perencanaan dan pengawasan. Dalam pelaksanaan fungsi perencanaan, maka motivator pengelolaan melibatkan institusi dinas atau sektor terkait bersama masyarakat lokal dan lembaga sawadaya pemerhati lingkungan dalam merumuskan rancangan program kegiatan sesuai kebutuhan yang akan menjadi kegiatan operasional. Pada fungsi manajemen pelaksanaan program kegiatan, maka porsi pelaksanaannya lebih dominan dijalankan oleh masyarakat dengan bimbingan institusi terkait atau LSM. Institusi terkait atau LSM pada tataran ini sebagai pembimbing operasional sekaligus pengawas kegiatan yang dijalankan masyarakat. Spektrum pengelolaan pada tataran ini berbasis *co-manajemen* dengan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah sangat besar.

Seiring dengan upaya eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya pesisir yang cukup besar di kawasan wisata pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Makassar untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat disekitarnya, maka upaya konservasi tetap dikedepankan demi pengelolaan dan pemanfaatan yang lestari. Aspek kebijakan konservasi dalam pengembangan wisata bahari Kota Makassar adalah:

1. Mengembangkan wisata bahari Kota Makassar yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
2. Keterlibatan masyarakat sebagai stakeholder dalam mengamankan dan melestarikan seluruh potensi wisata dan obyek wisata agar

terhindar dari degradasi lingkungan fisik maupun lingkungan sosial budaya.

3. Membuat perencanaan teknis guna penanganan khusus terhadap obyek wisata snorkling dan diving yang rawan mengalami penurunan kualitas dan kuantitas yang mempunyai nilai jual tinggi.
4. Membuat perencanaan penelitian tentang dampak lingkungan terhadap aktifitas wisata bahari.
5. Penetapan perangkat hukum berupa PERDA terhadap zona-zona yang telah direncanakan sebagai kawasan konservasi. Penguatan badan hukum yang dapat menjadi pegangan pengelola terhadap kawasan lindung akan sangat mendukung kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
6. Kegiatan penyadaran, sosialisasi dan pelatihan rehabilitasi terumbu karang sampai pada tingkat desa perlu ditingkatkan. Proses penyadaran terhadap pentingnya menjaga ekosistem lingkungan melalui pendekatan budaya dan agama.
7. Kebutuhan untuk melakukan pengawasan terhadap ekosistem mangrove yang masih baik dan kegiatan rehabilitasi di lokasi yang rusak melalui penyertaan dan pelibatan masyarakat, LSM lokal dan perguruan tinggi.

Kebijakan Infrastruktur

Kebijakan infrastruktur dalam pengembangan wisata bahari di Kota Makassar merupakan landasan kebijakan dari (1) pengembangan aksesibilitas dan utilitas/fasilitas wisata bahari, dan (2) pengembangan pasar dan promosi. Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam membangun wisata bahari khususnya di gugusan pulau-pulau kecil Kota Makassar dan sekitarnya adalah minimnya sarana dan prasarana transportasi, padahal akses transportasi merupakan urat nadi pembangunan wisata bahari yang sangat penting mengingat letak geografis wilayah ini, secara regional terletak jauh dari Kota Makassar dengan jarak yang berbeda-beda antar pulau.

Pembangunan sarana dan prasarana transportasi tidak bisa dilepaskan dari seluruh perencanaan pembangunan di Kota Makassar.

Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan wisata bahari berupa akomodasi seperti pondok wisata dan penginapan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian, konsultan dan swasta sudah harus dilakukan secara terpadu oleh seluruh instansi, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak swasta. Pengembangan sarana utilitas berupa akomodasi seperti pondok wisata dan penginapan dan sarana wisata antar pulau ini seperti penambahan armada perahu dan pembangunan dermaga diprioritaskan pada pantai-pantai yang memiliki pasir putih dan berpemandangan indah.

Kebijakan dalam pengembangan pasar dan promosi dapat dilakukan dengan mengadakan sistem informasi dan bauran promosi terpadu dengan Dinas Pariwisata Kota Makassar, Bali, Flores, Manado dan Kendari, kepada pasar utama pariwisata Bagian Timur Indonesia. Pemerintah Kota Makassar melakukan sosialisasi atau promosi mengenai pengembangan kawasan wisata bahari ini baik di kawasan pesisir maupun di kawasan pulau-pulau kecil yang mendapat dukungan dari semua unsur yang terlibat termasuk masyarakat lokal dan pihak pengembang sebagai investor. Pemasaran kawasan wisata bahari ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar yang didukung oleh Pemerintah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan melakukan kerjasama dengan pola kemitraan yang melibatkan semua stakeholder dan masyarakat lokal untuk mempromosikan kawasan wisata bahari tersebut.

Adapun kebijakan pasar dan promosi tersebut adalah:

1. Dibentuknya Badan Pariwisata Bahari Kota Makassar sebagai badan independen untuk mengelola produk dan pemasaran kepariwisataan
2. Ditetapkannya sasaran pasar yang ada dan potensial (*existing and potential market*).
3. Mengembangkan pasar domestik dengan penyesuaian produk wisata yang ada.
4. Menggunakan tema "*Wonderful Indonesian*" dalam setiap kegiatan promosi yang dikalikan di luar negeri dan tema "Kenali Negerimu Cintai Negerimu Ayo Tamsaya Jelajahi Nusantara" dalam setiap kegiatan promosi di dalam negeri.

Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan wisata bahari meliputi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan menyiapkan sumberdaya manusia yang profesional dan bertaraf internasional.

Pengembangan wisata bahari di Kota Makassar harus menerapkan prinsip partisipasi masyarakat yang mengandung makna bahwa proses pelibatan masyarakat, baik secara aktif maupun pasif, harus dimulai sejak tahap perencanaan hingga tahap pengelolaan dan pengembangan, monitoring dan evaluasi. Hal ini akan menumbuhkan tanggung jawab dan rasa memiliki yang akan menentukan keberhasilan dan keberlanjutan pengembangan wisata bahari di Kota Makassar. Dialog dengan umpan balik dari masyarakat dalam upaya pengambilan keputusan pengembangan wisata bahari khususnya di pulau-pulau kecil, akan memperkaya dan menjadi nilai tambah suatu kegiatan yang akan dijalankan.

Selain itu, diperlukan kejujuran dan keterbukaan untuk memperoleh kepercayaan dari pihak lain yang terlibat dalam proses partisipasi tersebut. Keterlibatan masyarakat harus difasilitasi, termasuk menginformasikan konsekuensi dan keterlibatan, dan menunjukkan bagaimana partisipasi masyarakat dapat menjadi nilai tambah. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan wisata bahari maka pengembangan kawasan yang dilakukan akan memberikan manfaat optimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu prinsip peran serta masyarakat bukan hanya sebagai slogan semata namun harus dilaksanakan secara tegas mencakup semua berbagai kepentingan masyarakat, kesetaraan dan kemitraan, transparansi, distribusi kewenangan yang seimbang, kesetaraan tanggung jawab serta pemberdayaan dan kerjasama. Masyarakat saat ini tidak bisa hanya dijadikan objek dari pembangunan wisata bahari tetapi juga sekaligus sebagai subjek pembangunan itu sendiri. Segala kebijakan dan perencanaan pembangunan harus dengan pendekatan *bottom up*, dimana aspirasi masyarakat tetap menjadi bahan pertimbangan utama. Keterlibatan masyarakat lokal dan pihak swasta tidak dapat ditinggalkan. Masyarakat lokal

sebagai objek sekaligus subjek dari perencanaan berbagai program pembangunan yang direncanakan harus dilibatkan sejak awal perencanaan. Untuk itulah perlunya dilakukan konsultasi publik sebelum suatu rencana program pembangunan wisata bahari yang terkait dengan wilayah perencanaan akan ditetapkan.

Pengembangan sumberdaya manusia di bidang wisata bahari di Kota Makassar sangat penting dilakukan mengingat sumberdaya manusia yang tersedia saat ini tidak berlatar belakang pariwisata. Oleh karena itu pengembangan sumberdaya manusia harus sesegera mungkin dilakukan guna menyediakan sendiri kebutuhan akan tenaga-tenaga wisata bahari yang terlatih sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai standar internasional. Adapun langkah-langkah pencapaiannya adalah:

1. Menyiapkan tenaga-tenaga terampil di bidang usaha wisata bahari.
2. Meningkatkan kemampuan berbahasa asing dikalangan stakeholders yang bergerak dibidang wisata bahari.
3. Memantapkan kesiapan masyarakat sebagai tuan rumah.
4. Meningkatkan kemampuan teknis di bidang manajemen kewisata baharian.
5. Meningkatkan kemampuan di bidang perencanaan dan pemasaran pariwisata.

Kebijakan Kelembagaan

Kelembagaan adalah kerangka acuan atau hak-hak yang dimiliki individu-individu untuk berperan dalam pranata kehidupan, tetapi juga berarti perilaku dari pranata tersebut. Setiap perilaku ekonomi juga sering disebut kelembagaan. Kesadaran masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Makassar terhadap pentingnya hidup berorganisasi atau berkelompok cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari terbentuknya kelompok-kelompok nelayan, koperasi dan usaha bersama di setiap tingkatan masyarakat sebagai wadah berkumpulnya nelayan untuk mensinergikan potensi dari masing-masing anggota. Terbentuknya wadah tersebut diharapkan dapat membawa pengaruh positif bagi individu yang tergabung di dalamnya. Melalui lembaga-lembaga tersebut,

proses peningkatan kemampuan anggota telah dilakukan melalui kegiatan pelatihan penguatan pengelolaan kelembagaan dan peningkatan kemampuan serta keterampilan sumber daya manusia (SDM). Peningkatan kapasitas individu mencakup:

1. Pengembangan kelembagaan, meliputi penguatan kelembagaan yang sudah ada dan pembentukan kelembagaan baru yang diperlukan untuk berjalannya mekanisme perencanaan berbasis masyarakat (MPBM) *Community Based Planning Mechanism* (CBPM) serta peningkatan kemampuan staf pemerintah dan masyarakat setempat.
2. Pengembangan SDM, meliputi peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan formal.
3. Penyediaan bantuan, diberikan kepada kelompok untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kapasitas masyarakat lokal.

Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk meningkatkan peran berbagai pihak, seperti: pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat yang berhubungan dengan pelaksanaan, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya alam untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penguatan kelembagaan di dalam pengembangan wisata bahari di Kota Makassar tidak akan berpengaruh positif terhadap kehidupan masyarakat jika tidak dikelola secara baik. Karena itu diperlukan suatu pengembangan wisata bahari sebagai aktifitas ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal.

Penutup

Pengembangan kawasan wisata bahari di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Makassar akan berhasil apabila pengembangannya terkait dengan aspek institusi atau lembaga pengelolanya, kebijakan ataupun dengan tata cara pengelolaannya, dimana isu strategis pengelolaan harus diawali oleh terbentuknya lembaga pengelola yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan kawasan sehingga keberadaan lembaga ini akan menjadi pendorong disusunnya tatacara pengelolaan. Salah satu pendekatan yang dapat membentuk lembaga pengelola sebagai penyusun tata cara pengelolaan wisata

bahari terpadu dan seimbang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah menerapkan model konseptual pengembangan wisata bahari secara berkelanjutan. Model konseptual pengembangan wisata bahari di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Makassar agar dapat berkelanjutan adalah pengembangan institusi yang terdiri dari pembentukan lembaga pengelola (*institutional arrangement*) melalui partisipasi dari berbagai institusi baik institusi pemerintah maupun institusi non pemerintah dan akan menghasilkan kesepakatan pengelolaan berupa konsorsium pengelola. Program pengembangan institusi ini dimaksudkan untuk penguatan lembaga pengelola kawasan wisata melalui kerjasama dan kesepakatan seluruh pihak terkait dengan melakukan penerapan pengelolaan berdasarkan prinsip kolaborasi pengelolaan bersama (*management collaboration*) dengan tetap menentukan pihak mana yang menjadi leading sektor. Peran dan kerjasama kelembagaan akan menjadi salah satu faktor utama yang perlu mendapat perhatian semua stakeholder dalam pengelolaan dan pengembangan wisata bahari Kota Makassar. Melalui model pengelolaan ini, peran pemerintah, profesional dan para pengusaha menjadi sangat penting untuk saling berkolaborasi dengan masyarakat lokal untuk mendorong bangkitnya pariwisata kota Makassar sebagai tulang punggung perekonomian Kota Makassar pada khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya. Kelembagaan yang akan mengemban tugas dan tanggungjawab harus mengakomodasi keterwakilan semua stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan wisata bahari tersebut. Adapun program aksi pengembangan institusi ini adalah optimalisasi forum koordinasi, konsultasi dan kerjasama antar stakeholder yang peduli wisata pesisir dan pulau-pulau kecil, serta melakukan pelatihan manajemen pengelolaan wisata bahari yang berbasis masyarakat. Koordinasi antar institusi ini menjadi hal yang sangat penting untuk dapat mencapai tujuan strategi pengelolaan wisata bahari berkelanjutan. Koordinasi dan kerjasama antar stakeholder wisata bahari tersebut terdiri dari pemerintah Kota Makassar dan pemerintah Provinsi Sulsel, pengemban kawasan wisata bahari (dunia usaha), masyarakat lokal, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan media massa.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2006, Makassar dalam Angka, Makassar.
- BAPEDALDA Sulawesi Selatan, 2004, Pemanfaatan dan Pengelolaan Dampak Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Kawasan Pantai Kota Makassar. Makassar : BAPEDALDA Sulawesi Selatan kerjasama dengan PPLH Universitas Hasanuddin.
- Debora, 2003, Dampak Pariwisata Terhadap Pencemaran Pantai Losari Kota Makassar (Tesis), Bogor : Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Departemen Kelautan dan Perikanan, 2001, Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat. Ditjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Jakarta : Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Departemen Kelautan dan Perikanan, 2005, Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Kota Makassar. Jakarta : Meridian Kreatama Mandiri.
- Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2007, *Master Plan* Pengembangan Pariwisata di Destinasi Unggulan Kepulauan *Spermonde*, Jakarta : Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata kerjasama dengan Profesional Delapan Tambah.
- Departemen Kelautan dan Perikanan, 2007, Rencana Zonasi Kawasan Pesisir Kota Makassar. Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Jakarta : Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan, 2004, Profil Pulau-Pulau Kecil Di Kota Makassar, Makassar : DKP Sulsel
- Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi-Selatan, 2005, Rencana Tata Ruang Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Makassar, Makassar : Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi-Selatan.
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sulawesi-Selatan, 2010, Gambaran Umum Kepariwisata Sulawesi-Selatan. Makassar : Propinsi Sulawesi-Selatan.
- Direktorat Pesisir dan Lautan Departemen Kelautan dan Perikanan, 2004, Pedoman Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Pesisir dan Laut, Jakarta : DKP
- Fauzi A dan Susi A, 2005, Evaluasi Status Keberlanjutan Pembangunan Perikanan: Aplikasi Pendekatan Raffish (Studi Kasus Perairan Pesisir DKI Jakarta). *Jurnal Pesisir dan Lautan. Indonesian Journal of Coastal and Marine Resources*, 4 (3): 43-55.
- Jompa, J., 2003, Profil Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kota Makassar. Kerjasama Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Makassar, Makassar : Pusat Studi Terumbu Karang Universitas Hasanuddin.
- Kurniawan R., 2010, Sistem Pengelolaan Kawasan Karst Maros-Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan secara Berkelanjutan (Disertasi), Bogor : Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Lewarherilla, NE, 2006, Analisis Kebijakan Pengelolaan Kawasan Taman Wisata Teluk Youtefa Jayapura (Disertasi), Bogor : Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Pusat Studi Lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sulawesi-Selatan, 2004, Gambaran Umum Kepariwisata Sulawesi-Selatan, Makassar : Propinsi Sulawesi-Selatan
- Ramli, 2010, Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Pantai Kota Makassar. *Jurnal Kepariwisata Indonesia* Vol 5. No. 3 September 2010, Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata Badan Pengembangan Sumberdaya Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Kebudayaan Pariwisata.
- Thamrin. 2009, Model Pengembangan Kawasan Agropolitan secara Berkelanjutan di Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia: Studi Kasus Kawasan Perbatasan Kabupaten Bengkawan-Serawak. (Disertasi). Bogor : Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Jakarta : Departemen Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata dan Peraturan Pelaksanaannya. Jakarta : Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta : Kementrian Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Jakarta : Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Wahyuni, B.Y.C. 2002, Pengelolaan Langskap Di Kawasan Wisata Tanjung Bunga Provinsi Sulawesi-Selatan, (Tesis), Bogor : Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

